

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Zainal., *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*,

Jakarta: ELSAM. 2005.

Ali, H.Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.1996

Barda Nawawi Arief, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:

Alumni, (2010)

Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo

Persada, 2002

Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Hidayat Syarifudin, dan Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar

Maju, 2002.

Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armic. 1984.

Lubis, Muhammad Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.

1994.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada. .2006.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung:Alumni.. 2007.

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1993

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco. 1980.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994.

Saherodji, Hari. *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2008.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sri Pudyatmoko, Y. *Perizinan Senjata Api*, Jakarta: Garsindo. 2009

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

B. Jurnal, Makalah, Artikel dan Internet

Ali Jamaluddin, Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat, www.repository.usu.ac.id, diakses pada Jumat tanggal 26/9/2014, pukul 13.52

Andri Donnal Putera, 'Polisi Amankan Senjata Api Rakitan Dan Ilegal Di Tangerang' (Kompas.com, 2017) <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/27/15205741/polisi-amankan-senjata-api-rakitan-dan-ilegal-di-tangerang> accessed 20 September 2017.

Andi Muttya Keteng Pangerang, 'Gatot Brajamusti Dijerat 3 Dakwaan, dari Satwa Liar dan Senjata Api' (Kompas.com, 2010) <http://entertainment.kompas.com/read/2017/10/10/164344110/gatotbrajamusti-dijerat-3dakwaan-dari-satwa-liar-dan-senjata-api> Dikases pada tanggal 20

September 2017.

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta : Prena
Media. Diakses pada tanggal 18 Januari 2010

Rasmita Juliana Sitepu, Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan
Kejahatan dengan Senjata Api, www.repository.usu.ac.id, diakses pada
Jumat tanggal 26/9/2014, pukul 13.48

<http://beritasatu.com/polda-jambi-musnahkansenpi-illegal> di akses pada
12,03,2019.

¹[https://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/11571081/polri-diminta-
evaluasikepemilikan-senjata-api-personelnya-secara-berkala?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/11571081/polri-diminta-evaluasikepemilikan-senjata-api-personelnya-secara-berkala?page=all).
Diakses pada tanggal 13 Oktober 2017.

[https://tirto.id/bukti-pengawasan-senpi-lemah-kasus-koboi-sopir-bmw-
perampok-toko-ecwU](https://tirto.id/bukti-pengawasan-senpi-lemah-kasus-koboi-sopir-bmw-perampok-toko-ecwU), diakses pada tanggal 17 Juli 2019.

[https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-
senjata](https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata), Diakses pada tanggal 13 September 2019.

[https://kontras.org/2017/04/29/saatnya-evaluasi-praktek-dan-persyaratan-
penggunaansenjata-api-di-lingkungan-polri/](https://kontras.org/2017/04/29/saatnya-evaluasi-praktek-dan-persyaratan-penggunaansenjata-api-di-lingkungan-polri/), diakses pada tanggal 29
April 2020.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210403/16/1376029/fakta-fakta-aksi-koboi->

[pengusaha-startup-acungkan-pistol-di-duren-sawit](#). dengan judul "Fakta-Fakta Aksi Koboi Pengusaha Startup Acungkan Pistol di Duren Sawit" diakses pada tanggal 03 April 2021.

<https://www.liputan6.com/news/read/4522567/5-fakta-aksi-pengemudi-fortuner-berlagak-koboi-jalanan-di-duren-sawit> yang diakses pada tanggal 03 April 2021.

<https://www.suara.com/news/2021/04/03/144640/ditetapkan-jadi-tersangka-koboi-mfa-kini-ditahan-polisi?page=all>, diakses pada hari sabtu tanggal 03 April 2021.

<https://kbbi.kata.web.id/?s=ilegal>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2019

<https://www.kamusbesar.com/orang-sipil> diakses pada tahun 12 November 2005.



C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api
(Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara)

(L.N 1951 No.78).

Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti
Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan
menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);

Indonesia (c), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian
Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/
Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.
Indonesia

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.